

ABSTRAK

PRONA merupakan salah satu program prioritas nasional legalisasi aset dengan salah satu tujuannya terwujudnya tertib administrasi pertanahan. Kegiatan PRONA di Provinsi Jawa Tengah selama 2010-2014 berhasil mencapai target 100%, sementara di tahun 2015 target tidak mencapai 100% meskipun targetnya lebih rendah dibandingkan tahun 2014. Tujuan penelitian adalah mengetahui dan menganalisis pelaksanaan PRONA dalam rangka mewujudkan tertib administrasi pertanahan di Provinsi Jawa Tengah, faktor yang mendorong dan menghambat, serta upaya mengatasi hambatannya.

Pendekatan penelitian adalah yuridis sosiologis, menggunakan sumber data sekunder dan data primer. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan, sedangkan data primer menggunakan wawancara. Teknik analisis data adalah analisis kualitatif.

Hasil penelitian adalah Pelaksanaan PRONA dalam rangka mewujudkan tertib administrasi pertanahan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 cenderung berhasil, yang diindikasikan dengan pencapaian target penerbitan sertifikat (100%) dan penyerapan DIPA hampir 100% (99,38%). Secara kualitatif tertib administrasi pertanahan telah terwujud yang ditunjukkan dengan tersedianya catatan mengenai obyek hak, kejelasan prosedur tata kerja, dan penyimpanan warkah; Faktor yang mendorong adalah memiliki landasan hukum yang kuat; tersedianya SOP dan petunjuk teknik pelaksanaan PRONA; kegiatan PRONA sudah berlangsung lama; terdapat dukungan anggaran dari APBN dan APBD; tersedianya sarana sosialisasi pertanahan kepada masyarakat; dan tingginya semangat kerja; Faktor penghambat adalah pelaksanaan tidak sesuai jadwal, anggaran terbatas, kurang koordinasi dan kerjasama, terbatasnya sarana dan prasarana, kesadaran masyarakat rendah, terdapat pungutan liar, nilai pajak tinggi, dan kondisi topografi kurang mendukung; Upaya mengatasi hambatan adalah memperbaiki dan meningkatkan kualitas internal BPN (misalnya dana, SDM, sarana dan prasarana, serta teknologi), melakukan kerjasama lintas sektoral (misalnya Polri, Kejaksaan, Perpajakan, dan Kedeputian I), serta sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran pada masyarakat.

Kata kunci: PRONA, tertib administrasi pertanahan, BPN

ABSTRACT

PRONA is one of the priority programs of the national legalization of assets with one of its goals the orderly realization of land administration. PRONA activities in Central Java province during the 2010-2014 managed to reach the target of 100%, while in 2015 the target is not reached 100% even though the target is lower than in 2014. The purpose of the study was to determine and analyze the execution PRONA in order to realize an orderly land administration in the Province Central Java, factors driving and inhibiting, as well as efforts to overcome the obstacles.

The approach is sociological juridical research, using secondary data and primary data sources. Secondary data were obtained through library research, while the primary data using interviews. The data analysis technique is qualitative analysis.

The results of the study are implementation of PRONA in order to realize an orderly land administration in Central Java province in 2015 tend to be successful, as indicated by the achievement of the issuance of the certificates (100%) and the absorption of DIPA almost 100% (99.38%). Qualitatively orderly administration of land have been realized as indicated by the availability of records on object rights, clear procedures work procedures, and storage warkah; factors that drive is to have a strong legal foundation; availability of SOP and instructions PRONA implementation techniques; PRONA longstanding activities; there is a budget support of state and local budgets; the availability of means of socialization of land to the public; and high morale; inhibiting factors is not appropriate implementation schedules, limited budgets, lack of coordination and cooperation, facilities and infrastructure, public awareness is low, there is extortion, tax value is high, and topographical conditions unfavorable; efforts to overcome resistance is to improve and increase the quality of internal BPN (eg, funds, human resources, facilities and infrastructure, and technology), conduct cross-sectoral cooperation (for example, police, Attorney, Tax, and Deputy I), as well as dissemination to raise awareness on community.

Keywords: PRONA, orderly land administration